



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-12.PR.01.03 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyinergikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat Pusat dan Kantor Wilayah dan dalam rangka implementasi pelaksanaan *revolusi digital* di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menyusun Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1664);

**MEMUTUSKAN:...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021.
- KESATU : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini adalah rencana atau strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan suatu kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 bertujuan untuk:
1. Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Strategi pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dan pengalihan nama jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tengah pandemi *Covid-19*;
  4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia *Corporate University* dalam rangka implementasi pelaksanaan revolusi digital di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Mendukung pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja serta penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
- KETIGA : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 terdiri dari:
1. Target Kinerja Unit Pusat;
  2. Target Kinerja Kantor Wilayah;
  3. *Action Plan* Target Kinerja Kantor Wilayah.
- KEEMPAT : Seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021.
- KELIMA : Pelaporan pelaksanaan Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 dilaksanakan melalui aplikasi Target Kinerja dengan laman <https://kinerja.kemenkumham.go.id>.

KEENAM:...

- KEENAM : Waktu Pelaporan sebagaimana Diktum KEEMPAT wajib diunggah secara berkala pada:
- a. Bulan Ketiga (B03) mulai tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021;
  - b. Bulan Keenam (B06) mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 5 Juli 2021;
  - c. Bulan Kesembilan (B09) mulai tanggal 28 September 2021 sampai dengan 5 Oktober 2021;
  - d. Bulan Kedua belas (B12) mulai tanggal 01 sampai dengan 10 Desember 2021.
- KETUJUHH : Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi dibentuk Tim Pembina Kinerja.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR M.HH-12.PR.01.03

**TARGET KINERJA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021**

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
<b>KEPALA KANTOR WILAYAH</b>						
1	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan nilai maturitas SPIP	1. Terlaksananya SPIP dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi, dan peningkatan maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham dengan predikat terdefinisi (Skor 4)	B03: 1. Pembentukan/ Pembaharuan Satgas SPIP di Kantor Wilayah dan UPT 2. Sosialisasi Target Tingkat Maturitas SPIP pada Kantor Wilayah oleh Inspektorat Jenderal dan BPKP Perwakilan	B03: 1. SK Tim Satgas SPIP 2. Laporan hasil sosialisasi	
				B09: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP	B09: Surat Tugas pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				pada satuan kerja oleh Kantor Wilayah	pada satuan kerja oleh Kantor Wilayah	
				B12: Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja oleh Kantor Wilayah	B12: Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja oleh Kantor Wilayah	
		2. Implementasi Manajemen Risiko (MR)	Terselenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018	B03: Persiapan pendampingan MR di lingkungan Kanwil: 1. Koordinasi dengan BPKP Perwakilan 2. Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penerapan MR	B03: 1. Laporan Koordinasi dengan BPKP 2. Laporan/Notula Pelaksanaan <i>Workshop</i> MR	
				B06: Pelaksanaan pendampingan penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	B06: Laporan pendampingan penerapan MR	
				B09: Pelaksanaan pendampingan	B09:	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				penerapan MR pada 10% satuan kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Laporan pendampingan penerapan MR	
				B12: Evaluasi Penerapan MR	B12: Laporan Evaluasi Penerapan MR	
2	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Tindak lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan Pemeriksaan BPK	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2018 ke bawah NIHIL	B03: 1. Inventarisasi data temuan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan hasil pengawasan Itjen 2. Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B03: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut	
				B06: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B06: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut	
				B09: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen	B09: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Pelaksanaan TLHP BPK dan hasil pengawasan Itjen Laporan Evaluasi	B12: 1. Laporan TLHP 2. Data Dukung Tindak Lanjut; 3. Laporan Evaluasi. 4. Laporan yang menyatakan TLHP Tahun 2018 ke bawah NIHIL	
3	Peningkatan kapasitas SDM Wilayah di bidang dukungan manajemen dan teknis melalui implementasi <i>Corporate University</i>	1. Meningkatnya kapasitas SDM di wilayah	Terlaksananya workshop/sosialisasi/ bimtek yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah dan UPT	B03: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Administratif Fasilitatif	B03: Laporan	
				B06: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Imigrasi	B06: Laporan	
				B09: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang Pemasarakatan	B09: Laporan	
				B12: Pelaksanaan <i>workshop/sosialisasi/ bimtek</i> Bidang	B12: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Pelayanan Hukum dan HAM		
		2. Tersusunnya <i>Best practice</i> di Kantor Wilayah	4 (empat) <i>Best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> di Kantor Wilayah	B06: Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Masyarakat dan Imigrasi	B06: 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Masyarakat dan Imigrasi	
				B12: Tersusunnya 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM	B12: 2 (dua) <i>best practice</i> Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> dalam bidang Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum dan HAM	
4	Entri data seluruh Informasi Pelayanan Publik Kemenkumham di wilayah pada portal SIPP (sipp.menpan.go.id)	1. Tersedianya data informasi seluruh pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP 2. Tersusunnya Pedoman Pengisian	Seluruh data pelayanan publik kemenkumham di wilayah terinput ke dalam portal SIPP	B06: 50% data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah terinput pada portal SIPP	B06: <i>Capture</i> data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		Sistem Informasi Pelayan Publik (SIPP)		B12: 100% data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah terinput pada portal SIPP	B12: <i>Capture</i> data dan informasi pelayanan publik kemenkumham di wilayah pada portal SIPP	
<b>KEPALA DIVISI ADMINISTRASI</b>						
5	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi	Indeks RB minimal Sangat Baik (>78-90)	1. Terpetakannya jumlah agen perubahan Kementerian Hukum dan HAM 2. Implementasi Area Perubahan Reformasi Birokrasi	B03: 1. Pencanaan dan penandatanganan Zona Integritas di wilayah dan UPT 2. Pemetaan jumlah agen perubahan	B03: 1. Laporan Pencanaan Zona Integritas 2. Peta jumlah agen perubahan	
				B06: 1. Pendampingan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM 2. Penguatan Reformasi Birokrasi di UPT	B06: Laporan	
				B09: Pendampingan PMPRB	B09: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
6	Pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Kearsipan untuk mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Digitalisasi Arsip 2. Dimusnahkannya Data Arsip Inaktif yang sudah memasuki masa retensi	1. Terdigitalisasinya Arsip di Wilayah 2. Terpublikasinya arsip digital yang dapat diakses publik sesuai dengan Keamanan Klasifikasi dan Hak Akses Arsip yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 56 Tahun 2016 3. Seluruh Data Arsip Inaktif yang sudah memasuki masa retensi dimusnahkan	B03: 1. 20% Arsip terdigitalisasi 2. Publikasi Arsip Digital 3. Mendata Data Arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi ke Biro Umum untuk diusulkan dimusnahkan	B03: 1. SK Tim 2. Daftar Arsip Digital 3. Data Arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi	
				B06: 1. 50% Arsip terdigitalisasi 2. Publikasi Arsip Digital 3. Mengirimkan surat usulan pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya kepada Setjen Cq Biro Umum	B06: 1. Daftar Arsip Digital 2. Data Arsip inaktif yang sudah memasuki masa retensi 3. Surat usulan pemusnahan arsip yang sudah habis masa retensinya kepada Setjen Cq Biro Umum	
				B09: 1. 100% Arsip terdigitalisasi 2. Publikasi Arsip Digital 3. Pelaksanaan	B09: Daftar Arsip Digital Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				pemusnahan arsip yang sudah disetujui oleh Kepala ANRI		
				B12: Pelaksanaan pemusnahan arsip yang sudah disetujui oleh Kepala ANRI	B12: Laporan pelaksanaan pemusnahan arsip	
7	Penerapan Protokol Kesehatan di perkantoran Kemenkumham di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	Menurunnya jumlah pegawai yang terpapar Covid 19	Tetap sehat di masa Adaptasi Kebiasaan Baru	B03: Inventarisasi jumlah pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 dan Sosialisasi protokol kesehatan	B03: 1. Data pegawai Kemenkumham yang terpapar Covid-19 2. Laporan pelaksanaan Sosialisasi	
				B06: Monitoring penerapan protokol kesehatan di Kantor Wilayah dan UPT	B06: Laporan monitoring	
				B09: Monitoring penerapan protokol kesehatan di Kantor Wilayah dan UPT	B09: Laporan monitoring	
				B12: Evaluasi dan Laporan	B12: Laporan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
8	Pengelolaan Sistem Integrasi Pengadaan Barang/Jasa Kemenkumham Unggul (SIPaSTIKU)	Optimalisasi Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui SIPaSTIKU	Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	B03: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B03: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	
				B06: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B06: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	
				B09: Laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B09: <i>Screenshot</i> laporan <i>Progress</i> Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	
				B12: Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	B12: <i>Screenshot</i> laporan Pelaksanaan per paket Pengadaan pada SIPaSTIKU	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
<b>KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM</b>						
9	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengharmonisasian, pemantapan konsepsi pada rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan	<p>B03: Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>B06: Terharmonisasinya rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah</p>	<p>B03: Laporan Koordinasi dengan melampirkan: 1. SK Pokja Perancang Peraturan Perundang-undangan 2. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota)</p> <p>B06: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Terharmonisasinya rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundangundangan Kantor Wilayah	B09: Laporan yang melampirkan surat permohonan pengharmonisasian, surat selesai harmonisasi, rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah, notula rapat, daftar hadir, dokumentasi	
				B12: Menyusun laporan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	B12: Laporan pengharmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
10	Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi	1. Terciptanya pemahaman pelaku usaha / korporasi terkait kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di wilayah	Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat ( <i>Beneficial Ownership</i> ) di wilayah	B03: Koordinasi awal untuk pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah	B03 1. Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Matrik data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah (data awal tahun)	
				B06: Diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode I	B06: Laporan diseminasi periode I (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, bahan / materi paparan)	
				B09: Diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode II	B09: Laporan diseminasi periode II (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, bahan / materi paparan)	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: Evaluasi atas pelaksanaan diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat	B12: 1. Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto, bahan / materi paparan) 2. Matrik data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah (data akhir tahun)	
		2. Tercapainya pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	B03: Koordinasi awal untuk pemetaan pengawasan terkait penerapan PMPJ di wilayah	B03: Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, tabel pemetaan, dokumentasi foto)	
				B06: Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode I	B06 Laporan hasil pengawasan periode I (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode II	B09 Laporan hasil pengawasan periode II (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12: Evaluasi atas pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah	B12: Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
11	Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah	Terciptanya pemahaman masyarakat di wilayah tentang pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	Tercapainya implementasi layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria untuk UMK di wilayah	B06: Koordinasi awal terkait peran kanwil dalam memperkenalkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah berdasarkan PP mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria Untuk UMK	B06: Laporan koordinasi awal (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B09: Pelaksanaan webinar mengenai layanan pendaftaran Perseroan	B09: Laporan pelaksanaan webinar (lampiran: surat undangan,	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	daftar hadir, notula, dokumentasi foto)	
				B12: Evaluasi atas pelaksanaan webinar mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	B12: 1. Laporan evaluasi (lampiran: surat undangan, daftar hadir, notula, dokumentasi foto) 2. Matrik jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria untuk UMK di wilayah	
12	Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah	Optimalisasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah	1. Terlaksananya Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah	B03: Persiapan Pelaksanaan Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan KI daerah	B03: Laporan Persiapan Pelaksanaan Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan KI daerah	
				B06: Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi	B06: Laporan Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				atau Pemerintah Daerah KI daerah	atau Pemerintah Daerah KI daerah	
				B09: Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah Paten dan KI daerah	B09: Laporan Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah Paten dan KI daerah	
				B12: Rencana Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual Kanwil dengan Perguruan Tinggi/Pemda dan Stakeholder Lainnya untuk tahun 2022	B12: Laporan Rencana Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual Kanwil dengan Perguruan Tinggi/Pemda dan Stakeholder Lainnya untuk tahun 2021	
			2. Terlaksananya Implementasi Kerjasama KI untuk meningkatkan Permohonan	B03: Koordinasi dengan Pusat untuk Menyusun Permohonan IG	B03: Laporan Koordinasi dengan Pusat untuk Menyusun Permohonan IG	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
			Pendaftaran IG dan Desain Industri	B06: Koordinasi dengan Pemda dan atau MPIG untuk Menyusun Permohonan Ig	B06: Laporan Koordinasi dengan Pemda dan atau MPIG untuk Menyusun Permohonan Ig	
				B09: Penyusunan Draft Permohonan IG	B09: Draft Permohonan IG	
				B12: Permohonan IG dan Desain Industri	B12: Bukti Permohonan IG dan Desain Industri	
13	Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah	Optimalisasi Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terlaksananya Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah	B03: Koordinasi dengan APH untuk pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI	B03: 1. Laporan Koordinasi dengan APH 2. Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	
				B06: Pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI dengan APH sesuai dengan target stakeholder pada Perjanjian Kinerja	B06: 1. Laporan Kegiatan Pencegahan 2. Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	
				B09: Pelaksanaan pencegahan	B09: 1. Laporan Kegiatan Pencegahan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				pelanggaran KI dengan APH sesuai dengan target stakeholder pada Perjanjian Kinerja	2.Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	
				B12: Rencana Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI tahun 2022	B12: 1.Laporan Kegiatan Pencegahan 2.Update Database pelanggaran kekayaan intelektual	
14	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia	B03: 1.Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM 2020 Provinsi, Kabupaten/Kota 2.Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	B03: 1.Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2020 2.Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B06: 1.Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Daerah	B06: 1.Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B04 tahun 2021	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B09: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	B09: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B08 tahun 2021 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	
				B12: 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan	B12: 1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B12 tahun 2021 2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	
15	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	<p>B03: Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan sama sekali)</p> <p>B06: 1. Notifikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang pelaporan indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pemeriksaan data indikator kriteria</p>	<p>B03: Laporan hasil pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan sama sekali)</p> <p>B06: Surat notifikasi Berita acara pemeriksaan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM		
				B09: 1. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	B09: Berita acara pemeriksaan	
				B12: 1. Notifikasi hasil penilaian kriteria kabupaten kota Peduli HAM 2. Evaluasi pelaporan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM	B12: 1. Surat notifikasi 2. Laporan Evaluasi	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
16	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang-Undang Cipta Kerja	Tersusunnya rekomendasi terhadap status produk hukum daerah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja baik perubahan, penggantian, pencabutan dan/atau pengintegrasian/simplifikasi berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya laporan hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	B03: Mengikuti bimbingan teknis analisis dan evaluasi produk hukum daerah melalui daring yang diselenggarakan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	B03: Bukti kehadiran mengikuti bimbingan teknis analisis dan evaluasi produk hukum daerah	
				B06: 1. Tersusunnya hasil inventarisasi produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi 2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (BPHN)	B06: 1. Daftar produk hukum daerah hasil inventarisasi 2. Pengisian dokumen (matrik) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				<p>B09:</p> <p>1. Tersusunnya hasil inventarisasi produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi</p> <p>2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (BPHN)</p>	<p>B09:</p> <p>1. Daftar produk hukum daerah hasil inventarisasi</p> <p>2. Pengisian dokumen (matrik) sesuai dengan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum</p>	
				<p>B12:</p> <p>Penyusunan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada BPHN</p>	<p>B12:</p> <p>Laporan akhir sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan yang berisi dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
17	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum	Terpenuhinya Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) secara Kuantitas dan kualitas	Meningkatnya Jumlah Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) yang didaftarkan oleh calon Pemberi Bantuan Hukum	B03: Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum, serta Penunjukkan Pokja Daerah	B03: 1. Laporan Kegiatan Diseminasi 2. SK Tim Pokja Daerah Verifikasi dan Akreditasi	
				B06: Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Baru)	B06: Rekomendasi Akreditasi PBH Baru	
				B09: Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)	B09: Rekomendasi Akreditasi PBH Lama	
18	Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi	Rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian/analisis data sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	B03: 1. Tersusunnya SK Tim Kajian/Analisis Kebijakan 2. Tersusunnya proposal Kajian/Analisis Kebijakan 3. Terlaksananya presentasi proposal 4. Pengolahan data dan evaluasi hasil	B03: 1. SK Tim 2. Proposal Kajian/Analisis Kebijakan 3. Bahan presentasi proposal (format power point), Surat Undangan, Notula, Daftar Hadir dan Foto dokumentasi kegiatan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		dan Hak Asasi Manusia di wilayah		Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A	presentasi proposal kajian/ Analisis Kebijakan 4. Data hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A Triwulan I	
				B06: 1. <i>Update</i> pengolahan data dan evaluasi hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A	B06: 1. Data hasil Survei <i>online</i> Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A Triwulan II 2. Hasil verifikasi lapangan	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				2. Pelaksanaan verifikasi ke lapangan 3. Pengolahan dan analisa data rekomendasi verifikasi lapangan	3. <i>Draft</i> laporan akhir hasil verifikasi	
				B09: 1. Presentasi <i>draft</i> laporan akhir dengan mengundang <i>stakeholders</i> . 2. Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kantor Wilayah 3. Perumusan Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian	B09: 1. Bahan presentasi <i>draft</i> laporan akhir, Surat Undangan, Notula, Daftar hadir, dan foto dokumentasi presentasi <i>draft</i> laporan akhir yang mengundang <i>stakeholders</i> ; 2. Laporan Akhir Kajian 3. <i>Capture</i> Bukti Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (e-	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
					<i>mail</i> ) dan Kepala Kantor Wilayah 4. Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian	
				B12: Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	B12: Laporan Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjut pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan	
19	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Termanfaatkannya data SIPKUMHAM dalam menyusun kebijakan di wilayah	Analisis kebijakan dengan memanfaatkan data SIPKUMHAM	B03: 1. Terbitnya SK Tim Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM 2. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	B03: 1. SK Tim Analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM 3. <i>Capture</i> input laporan pada	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				3. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM	aplikasi SIPKUMHAM	
				B06: 1. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 2. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	B06: 1. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM	
				B09: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM	B09: 1. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. <i>Capture</i> input laporan pada aplikasi SIPKUMHAM	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B12: 1. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 3. Evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	B12: 1. Laporan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. <i>Capture</i> input laporan di aplikasi SIPKUMHAM 3. Laporan evaluasi analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
<b>KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN</b>						
20	Penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload</i> Basan Baran pada Rutan dan Rupbasan	Menurunnya jumlah <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload</i> Basan Baran dengan penerapan Teknologi Informasi dan pertukaran data antar institusi penegak hukum	Terselenggaranya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Rutan dan Rupbasan	B03 1. Perjanjian Kerjasama Penanganan <i>overstaying</i> tahanan dan <i>Overload</i> Basan Baran dengan APH terkait	B03 1. Dokumen Perjanjian Kerjasama	
				B06 1. Pelaksanaan pertukaran data <i>overstaying</i> tahanan dan <i>overload</i> basan baran berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum 2. Pelaksanaan pemindahan tahanan dan eksekusi basan baran	B06 1. Laporan Pelaksanaan Pertukaran data 2. Laporan Pemindahan Tahanan dan Pelaksanaan Eksekusi basan baran	
				B09 1. Pelaksanaan pertukaran data <i>overstaying</i>	B09 1. Laporan Pelaksanaan Pertukaran data	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				tahanan dan basan baran berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum 2. Pelaksanaan pemindahan tahanan dan eksekusi basan baran	2. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Tahanan dan Eksekusi basan baran	
				B12 Monitoring dan Evaluasi	B12 Laporan Monitoring dan Evaluasi	
21	Pelatihan Keterampilan narapidana melalui kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	Meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi	1. Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat 2. Pengembangan lapas produktif sesuai dengan kearifan lokal wilayah masing-masing 3. Pelaksanaan Pembinaan melalui Saran Asimilasi dan Edukasi (SAE) di wilayah	B06: 1. Pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Implementasi Lapas Produktif pada UPT <i>Pilot Project</i> 3. Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	B06: 1. Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT <i>Pilot Project</i> 3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: 1. Pelaksanaan Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Implementasi Lapas Produktif 3. Pelaksanaan pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	B09: 1. Pelatihan narapidana yang bersertifikasi 2. Laporan Implementasi Lapas Produktif pada UPT Pilot Project 3. Laporan Pelaksanaan Pembinaan melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
22	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	Tahanan/ Narapidana/ Anak pecandu dan penyalahguna narkotika memperoleh layanan Rehabilitasi Narkotika	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	B03: Mentoring tata kelola penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat  B06: Supervisi manajemen penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	B03: Laporan pelaksanaan Mentoring  B06: Laporan supervisi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: Supervisi teknis layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat di UPT Masyarakat	B09: Laporan supervisi	
				B12: Evaluasi penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	B12: Laporan Evaluasi penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika di UPT Masyarakat	
23	Pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Optimalisasi fungsi kelompok masyarakat (Pokmas)	Terlaksananya fungsi Pokmas	B06: 1.Sosialisasi Pedoman Kerja Pokmas 2.Penyusunan Rencana Kerja Pokmas 3.Implementasi Rencana Kerja Pokmas	B06: 1.Sosialisasi Pedoman Kerja Pokmas 2.Penyusunan Rencana Kerja Pokmas 3.Implementasi Rencana Kerja Pokmas	
				B12: Monev Pelaksanaan Keadilan Restoratif melalui pemberdayaan Pokmas	B12: Laporan Monev	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
24	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (Kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan	1. Meningkatnya Koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	Seluruh Lapas dan Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	<p>B03</p> <p>1. Melakukan koordinasi pengamanan dengan POLDA, KODAM ,BNNP, BIN Daerah dan Perwakilan OMBUDSMAN</p> <p>2. Perjanjian Kerjasama (PKS) di bidang pengawalan, pelatihan, pengamanan dan pertukaran informasi dengan POLDA, KODAM, BNNP, BIN Daerah dan Perwakilan OMBUDSMAN</p>	<p>B03:</p> <p>1. Laporan Pelaksanaan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait</p> <p>2. Dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS)</p> <p>3. Dokumen pertukaran informasi dan data</p>	
				<p>B06:</p> <p>1. Konsultasi Teknis di Bidang Keamanan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pemasarakatan</p>	<p>B06:</p> <p>1. Laporan Konsultasi Teknis</p> <p>2. Laporan Pelatihan Kesamaptaan</p> <p>3. Laporan Pengawalan dan Pengamanan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				2. Menyelenggarakan pelatihan di bidang Kesamaptaan bagi 30 orang petugas masyarakatan 3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pengawalan dan pengamanan bagi 30 orang petugas masyarakatan 4. Koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data	4. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data	
				B09: Koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik	B09: Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				sambang, pertukaran informasi dan data	tilik sambang, pertukaran informasi dan data	
				B12: 1. Koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data 2. Monitoring dan Evaluasi	B12: 1. Laporan koordinasi dalam rangka pengawalan, pemindahan, penggeledahan, dan bantuan pengamanan, patroli tilik sambang, pertukaran informasi dan data 2. Laporan monev	
		2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan Kamtib yang bersumber dari dalam maupun dari luar	Seluruh Lapas dan Rutan telah melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban	B03 1. Konsultasi Teknis Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban 2. inventarisir laporan hasil deteksi dini dari Lapas dan Rutan 3. Supervisi terkait pelaksanaan kegiatan Deteksi	B03: 1. Laporan Pelaksanaan konstek deteksi dini kerawanan gangguan kamtib 2. Data inventarisir laporan hasil deteksi dini dari Lapas dan Rutan 3. Laporan Supervisi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan		
				B06: Supervisi terkait pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan	B06: Laporan Supervisi	
				B09: Supervisi terkait pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lapas dan Rutan	B09: Laporan Supervisi	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	
		3. Inspeksi mendadak, tes urin bagi petugas dan narapidana/ tahanan/anak dan pemindahan bandar narkoba ke	Terlaksananya inspeksi mendadak dan tes urin bagi petugas dan narapidana/tahanan /anak dan pemindahan bandar narkoba ke lapas <i>maximum security</i>	B03: : Pelaksanaan inspeksi mendadak	B03: Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA	
				B06: 1. Pelaksanaan inspeksi	B06: 1. Laporan Pelaksanaan	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		lapas <i>maximum security</i>		mendadak 2. Pelaksanaan Tes Urin	Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA 2. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba	
				B09: Pelaksanaan inspeksi mendadak	B09: Laporan Pelaksanaan Inspeksi Mendadak pada Lapas, Rutan dan LPKA	
				B12: 1. Pelaksanaan Tes Urine 2. Pemandahan Bandar Narkoba 3. Monitoring dan Evaluasi terkait dengan tindak lanjut hasil deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	B12: 1. Laporan Pelaksanaan Tes Urin bagi WBP dan Petugas yang terindikasi menggunakan Narkoba 2. Laporan Pemandahan Bandar Narkoba 3. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		4. Validasi dan akurasi data keamanan	Meningkatkan validitas dan akurasi data keamanan	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Sosialisasi pelaksanaan penginputan Fitur Keamanan pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP)</li> <li>2.Pembentukan Operator Fitur Keamanan pada SDP</li> <li>3.Pelaksanaan Konsultasi teknis Pelaksanaan Penginputan Dat Fitur Keamanan pada SDP</li> <li>4.Supervisi pelaksanaan penginputan data Fitur Keamanan SDP di UPT Pemasarakatan</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Laporan Sosialisasi</li> <li>2.SK Pembentukan/ Surat Perintah Pembentukan Operator SDP Fitur Keamanan</li> <li>3.Laporan Konultasi Teknis (Konstek)</li> <li>4.Laporan Supervisi (Dokumentasi) input pada Register F, Register H, Manajemen penempatan, perlengkapan pengamana, lalu lintas portir)</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <p>Supervisi pelaksanaan penginputan data</p>	<p>B06:</p> <p>Laporan Supervisi (Dokumentasi) input pada Register F,</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Fitur Keamanan SDP di UPT Pemasarakatan	Register H, Manajemen penempatan, perlengkapan pengamana, lalu lintas portir)	
				B09: Supervisi pelaksanaan penginputan data Fitur Keamanan SDP di UPT Pemasarakatan	B09: Laporan Supervisi (Dokumentasi) input pada Register F, Register H, Manajemen penempatan, perlengkapan pengamana, lalu lintas portir)	
				B12: Evaluasi pelaksanaan Penginputan Data Fitur Keamanan	B12: Laporan Evaluasi	
		5. Lapas dan Rutan bebas dari peredaran gelap narkoba melalui optimalisasi pelaksanaan Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satopspatnal)	1. Kedisiplinan Petugas 2. Pelaksanaan Tugas Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U). 3. Pelaksanaan	B03: 1. Penetapan pembentukan Satuan Operasional Kepatuhan Internal UPT Pemasarakatan 2. Penguksahan Satuan	B03: 1. Surat Keputusan Tim satuan Tugas Operasiona I Kepatuhan Internal (Satopspatnal ) 2. Laporan Pelaksanaan Penguksahan 3. Laporan Hasil	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
		sesuai Keputusan Direktur Jenderal tentang Pedoman Satuan Operasional Kepatuhan Internal Masyarakat	Layanan Kunjungan 4. Pelaksanaan Penjagaan. 5. Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling. 6. Pelaksanaan Pengawasan. 7. Pelaksanaan Penempatan Narapidana/tahanan/ Anak Dalam Kamar Hunian. 8. Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya 9. Layanan Registrasi dan Integrasi. 10. Tertib Administasi dan keuangan	Operasional Kepatuhan Internal Wilayah 3. Pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	
				B06: Pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	B09: Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	
				B09: Pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	B09: Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah	
				B12: 1. Pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah 2. Monitoring dan Evaluasi 3. Workshop satopspatnal	B12: 1. Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan Satopspatnal Wilayah 2. Laporan Monev	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
25	Penerapan SPPT-TI pada UPT Lapas/Rutan/Bapas <i>Pilot Project</i>	Pelaksanaan pertukaran data berbasis Teknologi Informasi dengan antar institusi penegak hukum melalui SPPT-TI	Terlaksananya pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi yang transparan, efektif, efisien pada UPT Lapas/Rutan/Bapas Pilot Project (Jumlah UPT Target Implementasi SPPT TI menyesuaikan dengan Target Polhukam)	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan UPT target SPPT TI tahun 2021</li> <li>2. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI</li> </ol>	<p>B03:</p> <p>Laporan Penyampaian SK Penetapan UPT Lapas, Rutan, Bapas target Implementasi</p>	
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT TI</li> <li>2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tenaga Pendukung SPPT TI</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama</li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan hasil monitoring;</li> <li>2. Laporan Bimtek</li> <li>3. Laporan Rapat koordinasi</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI		
				B09: 1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPPT TI 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tenaga Pendukung SPPT TI 3. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Implementasi SPPT TI bersama Komponen Utama dan Pendukung SPPT TI	B09: 1. Laporan hasil monitoring; 2. Laporan Bimtek 3. Laporan Rapat koordinasi	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monev	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
<b>KEPALA DIVISI IMIGRASI</b>						
26	Pelayanan <i>Eazy Passport</i>	Meningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan <i>Eazy Passport</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan paspor di luar Kantor Induk meningkat sehingga memberikan kontribusi terhadap penerimaan PNB</li> <li>2. Memberikan pelayanan prima sehingga menimbulkan kesan positif terhadap IMIGRASI</li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan rencana kegiatan</li> <li>2. Sosialisasi Layanan <i>Eazy Passport</i> ke Intansi Pemerintah/ Swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan</li> <li>3. Pelaksanaan pelayanan <i>Eazy Passport</i></li> </ol>	<p>B03:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Tim</li> <li>2. Laporan sosialisasi</li> <li>3. Laporan kegiatan</li> </ol>	
				<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Layanan <i>Eazy Passport</i> ke Intansi Pemerintah/Swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan</li> <li>2. Pelaksanaan pelayanan <i>Eazy Passport</i></li> </ol>	<p>B06:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan sosialisasi</li> <li>2. Laporan kegiatan</li> </ol>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09: 1.Sosialisasi Layanan <i>Eazy Passport</i> ke Intansi Pemerintah/ Swasta/BUMN, komunitas, sekolah dan perumahan 2.Pelaksanaan pelayanan <i>Eazy Passport</i>	B09: 1. Laporan sosialisasi 2. Laporan kegiatan	
				B12: Monitoring dan Evaluasi	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi	
27	Pengembangan Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	1. Terlaksananya Kegiatan rapat Timpora Tingkat Provinsi 2. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran WNI/ WNA	1.Terlaksananya Rapat Koordinasi Penegakan Hukum (Gakkum) 2.Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran WNI/ WNA 3.Terlaksananya rapat koordinasi timpora 4.Terlaksananya operasi gabungan timpora tingkat Provinsi	B03: 1. Pelaksanaan rapat Timpora Tingkat Provinsi 2. Terlaksananya operasi gabungan Timpora WNA pada UPT  B06: Terlaksananya operasi gabungan Timpora WNA pada UPT	B03: Laporan dan pemetaan WNA  B06: Laporan Dokumentasi	



NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	DATA DUKUNG	KETERANGAN
				B09 : Operasi gabungan Timpora tingkat Provinsi	B09: Laporan Dokumentasi	
				B12: 1.Evaluasi Penyelidikan terhadap WNA/ WNI 2.Tersajinya laporan dan evaluasi kegiatan timpora tingkat Provinsi	B09: Laporan Dokumentasi	